

SKRIPSI

PENGARUH KONTRIBUSI UMKM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:

**ASMAUL HUSNA
NIM. 220604012**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

SKRIPSI

**PENGARUH KONTRIBUSI UMKM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI
PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**ASMAUL HUSNA
NIM. 220604012**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asmaul Husna
NIM : 220604012
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Asmaul Husna

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Kontribusi Umkm dan Pembiayaan Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh

Disusun oleh:

Asmaul Husna
NIM : 220604012

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Maimun, S.E,Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

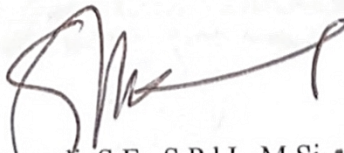
Pembimbing II



Hafiih Maulana S.P.,S.H.I.,M.E
NIP. 199001062023211015

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh

Asmaul Husna

NIM: 220604012

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juli 2026 M
13 Safar 1447 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Maimun, S.E.Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris


Hafizh Maulana S.P.,S.H.I.,M.E
NIP. 190001062023211015

Penguji I


Cut Aknawal, S.E.,M.Si.Ak.CA
NIP. 197407242007011021

Penguji II


Ibnu Hajar, S.E.,M.Sc
NIP. 199706232025051004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 220604012
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 220604012@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 Juli 2026

Mengetahui:

Penulis

Asmaul Husna
NIM. 2206004012

Pembimbing I,

Dr. Maimun, S.E., Ak.M.Si
NIP.197009171997031002

Pembimbing II

Haffizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIP.199001062023211015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh”** dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang menjadi pembawa risalah Islam, pemberi petunjuk bagi umat manusia, serta teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, ketulusan, dan rasa hormat, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Ar-Raniry dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafizh Maulana S.P.,S.H.I., M.E Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Maimun, S.E,Ak.M.Si selaku Pembimbing I dan Hafiizh Maulana S.P.,S.H.I.,M.E selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Cut Aknawal, S.E.,M.Si.Ak.CA dan bapak Ibnu Hajar, S.E.,M.Sc selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan masukan.
6. Uliya Azra, S.E., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, motivasi, dan perhatian kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, khususnya program studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta waswasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Teristimewa, kepada orang tua tercinta Ayahanda T.Ali Ruddin dan Ibunda Nurbaiti, dua orang yang sangat berjasa dalam

hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan setiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuannya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk pintu surgaku yaitu ibunda, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis, senantiasa mendidik, memberikan doa dan dukungan tanpa henti, yang selalu mengiringi setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

9. Untuk kedua kakak kandung perempuan penulis yaitu Anisatul Ulfa & Susi Susanti terima kasih karena selalu hadir sebagai saudara, sahabat, sekaligus penyemangat dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan selama ini. Kepada adik laki-laki saya, T.M. Fayyadh Al-Muzaffar yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang

akademik maupun *non*-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak. Dan untuk wawak yaitu kakak dari ayah penulis yaitu Cut Fatimah terima kasih karena telah menjadi salah satu sosok yang turut mendukung proses perkuliahan penulis. Segala kebaikan, kepedulian, dan bantuan yang diberikan memiliki arti yang sangat besar bagi penulis.

10. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, ceria, sederhana dan kuat yaitu diri saya sendiri, Asmaul Husna. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakannya semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Banda Aceh, 28 Juli 2026
Penulis

Asmaul Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mistr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 220604012
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu
Ekonomi
Judul : Pengaruh Kontribusi Umkm dan Pembiayaan
Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Provinsi Aceh
Pembimbing 1 : Dr. Maimun, S.E,Ak.M.Si
Pembimbing 2 : Hafiih Maulana S.P.,S,H.I.,M.E

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh tahun 2008–2024. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data *time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi UMKM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pembiayaan syariah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada taraf nyata 5%. Secara simultan, diperoleh hasil bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor utama yang mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh terletak pada penguatan kontribusi UMKM, sehingga arah kebijakan pemerintah daerah disarankan untuk difokuskan pada peningkatan daya saing UMKM serta optimalisasi penyaluran pembiayaan syariah ke sektor-sektor produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Kata Kunci: *Kontribusi UMKM, Pembiayaan Syariah, Penyerapan Tenaga Kerja*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Penelitian	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Pembahasan	15
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 18
2.1 UMKM.....	18
2.1.1 Definisi UMKM.....	18
2.1.2 Teori UMKM	20
2.1.3 Indikator UMKM	21
2.1.4 Kriteria UMKM	22
2.1.5 Ciri- Ciri UMKM	23
2.1.6 Jenis-Jenis UMKM	24
2.1.7 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Sektor dan Aktivitas	25
2.1.8 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Formalitas dan Legalitas	26
2.1.9 Tantangan dan Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM Berdasarkan Klasifikasi	26
2.2 Pembiayaan Syariah.....	27

2.2.1 Definisi Pembiayaan Syariah	27
2.2.2 Teori Pembiayaan Syariah	29
2.2.4 Karakteristik Pembiayaan Syariah	32
2.2.5 Prinsip Dasar Syariah.....	33
2.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	36
2.3.1 Definisi Penyerapan Tenaga Kerja	36
2.3.2 Teori Ketenagakerjaan	37
2.3.3 Indikator Penyerapan Tenaga Kerja.....	38
2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.....	39
2.3.5 Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ..	43
2.3.6 Permintaan Tenaga Kerja.....	44
2.4.1 Keterkaitan Antar Kontribusi UMKM Dan Penyerapan Tenaga Kerja	48
2.4.2 Keterkaitan Antar Pembiayaan Syariah Dan Penyerapan Tenaga Kerja	49
2.5 Penelitian Terkait	50
2.6 Kerangka Berpikir	57
2.7 Hipotesis Penelitian.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Desain Penelitian.....	59
3.2 Jenis dan Sumber Data	59
3.3 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4 Variabel Penelitian	61
3.4.1 Variabel Independen (X).....	61
3.4.2 Variabel Dependen (Y)	61
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	62
3.6 Metode Analisis.....	63
3.6.1 Metode Uji Asumsi Klasik.....	63
3.7 Analisis Data	66
3.8 Pengujian Hipotesis	67
3.8.1 Uji Parameter Individu (Uji T).....	67
3.8.2 Uji Secara Simultan (Uji F)	68
3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	70
4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	70
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	71
4.2.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Aceh	72
4.2.2. Perkembangan Kontribusi UMKM di Provinsi Aceh...	74
4.2.3. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Provinsi Aceh .	77
4.3 Uji Asumsi Klasik	79
4.3.1 Uji Normalitas.....	80
4.3.2 Uji Multikolinearitas	80
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	81
4.3.4. Uji Autokorelasi	82
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	83
4.5 Uji Hipotesis	84
4.5.1. Uji Parsial (Uji t).....	84
4.5.2. Uji Simultan (Uji F)	85
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	86
4.6.1. Pengaruh Kontribusi UMKM Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh.....	87
4.6.2. Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh.....	89
4.6.3. Pengaruh Secara Simultan Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh	91
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait51

Tabel 3.1 Operasional Variabel62

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif72

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas81

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas82

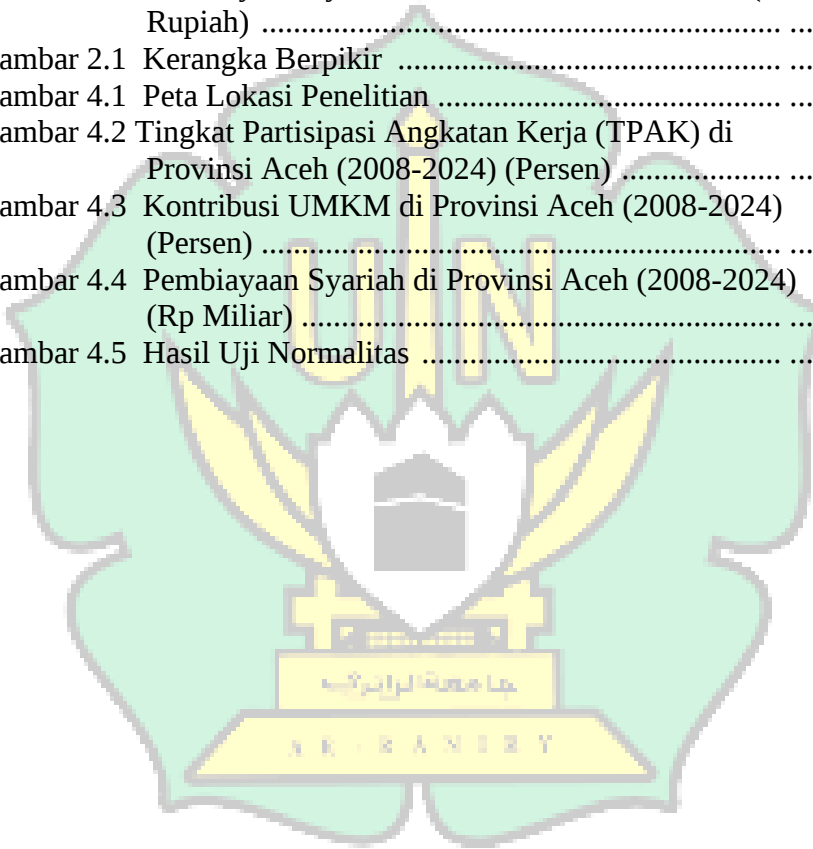
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi82

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	TPAK Provinsi Aceh 2020-2024 (Persen)	2
Gambar 1.2	Distribusi PDRB ADHB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Periode 2020-2024 (Persen)	7
Gambar 1.3	Pembiayaan Syariah Provinsi Aceh 2020-2024 (Miliar Rupiah)	9
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	57
Gambar 4.1	Peta Lokasi Penelitian	70
Gambar 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh (2008-2024) (Persen)	73
Gambar 4.3	Kontribusi UMKM di Provinsi Aceh (2008-2024) (Persen)	76
Gambar 4.4	Pembiayaan Syariah di Provinsi Aceh (2008-2024) (Rp Miliar)	78
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kontribusi UMKM, Pembiayaan Syariah, dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh	100
Lampiran 2. Output Hasil Uji Regresi Linear Berganda	101
Lampiran 3. Output Hasil Uji Deskriptif.....	101
Lampiran 4. Output Hasil Uji Normalitas	102
Lampiran 5. Output Hasil Uji Multikolinearitas	102
Lampiran 6: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas	103
Lampiran 7: Output Hasil Uji Autokorelasi	10



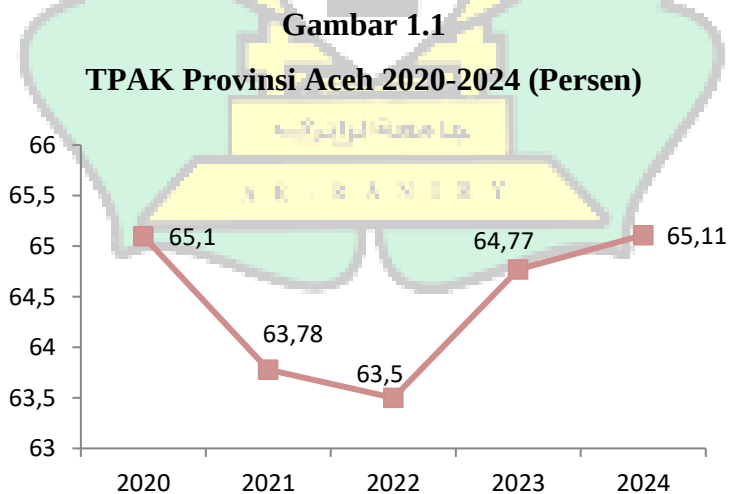
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai tantangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja setiap tahunnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga penyerapan tenaga kerja belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih adanya penduduk yang menganggur serta belum meratanya kesempatan kerja di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Aceh perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara efektif, maka dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, potensi sumber daya manusia yang dimiliki daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mengurangi produktivitas ekonomi dan memperlambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Silalahi *et al.*, 2023). Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah usia kerja atau struktur umur penduduk. Kalau diperhatikan dari waktu ke waktu, TPAK cenderung menurun, maka penambahan angkatan kerja dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Ledakan kelahiran yang terjadi pada Tahun 1971-1980. Penurunan TPAK disebabkan karena turunya tingkat partisipasi anak-anak umur sekolah dalam angkatan kerja karena membaiknya fasilitas dan keadaan pendidikan. Dalam masa-masa yang akan datang TPAK anak umur sekolah masih akan menurun, tetapi TPAK perempuan diperkirakan akan naik, sehingga secara keseluruhan TPAK tidak dapat diharapkan akan turun (Gatiningsih, 2022).



Sumber: BPS Aceh, diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Data BPS mencatat bahwa perkembangan TPAK di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 65,10 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 63,78 persen dan kembali turun menjadi 63,50 persen pada tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya pelemahan partisipasi tenaga kerja yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi. Memasuki tahun 2023, TPAK kembali meningkat menjadi 64,77 persen dan terus naik hingga mencapai 65,11 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya proses pemulihan pasar kerja di Aceh, meskipun secara keseluruhan angka TPAK dalam lima tahun terakhir relatif masih berada di kisaran yang sama dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Ketenagakerjaan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan manusia. Dengan kata lain, perlu dicapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dalam arti memberikan manfaat bagi tenaga kerja. Peranan sumber daya manusia sangat penting sehingga suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat apabila di wilayah tersebut minim tenaga kerja yang dapat menggali dan mengolah alam tersebut

dengan baik. Sebaliknya jika di suatu daerah yang memiliki sumber daya modal yang minim, namun memiliki banyak tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, maka sumber daya alam yang kecil ini dapat diolah secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut (Pratama *et.al.*, 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah UMKM merupakan ekonomi berbasis kekayaan. Oleh sebab itu, perannya sangat penting dalam membangun ekonomi nasional diantaranya dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berperan dalam pemerataan dan peningkatan penghasilan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi (Safriani, 2020). UMKM berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Seiring dengan meningkatnya UMKM di Aceh, tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang menghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis berupa penguatan sektor industri dan jasa, serta dukungan modal bagi UMKM agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan (Pangestu D, 2025).

Pembiayaan modal usaha dapat diperoleh dari lembaga perbankan dan nonperbankan. Kendala pelaku UMKM dalam

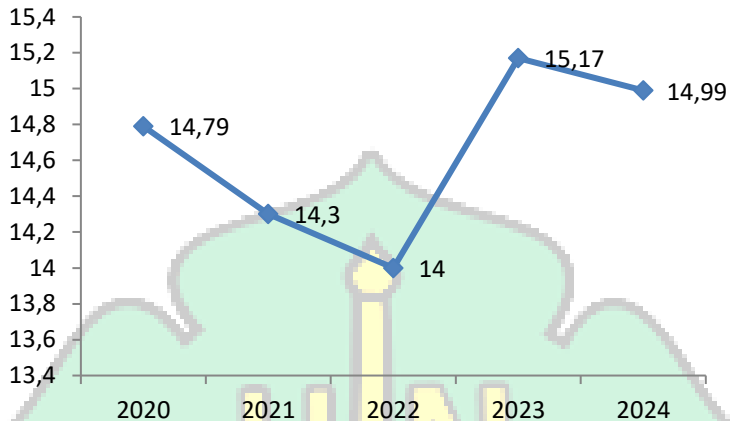
mendapatkan pembiayaan dari bank, yaitu pelaku UMKM unbankable atau memiliki risiko yang tinggi. Selain itu, pelaku UMKM tidak mengetahui informasi terkait adanya berbagai pembiayaan dari lembaga perbankan dan nonperbankan. Pembiayaan syariah adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan sumber permodalan sendiri. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia terutama Aceh pasti akrab dengan keuangan syariah, khususnya pembiayaan keuangan Islam. Dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang, UMKM menjadi sarana efektif dalam mempersempit kesenjangan sosial ekonomi. Mereka memberikan peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti masyarakat pedesaan, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang sulit mengakses sumber daya (Suhada *et al.*, 2025).

Berdasarkan berita dari JDIH BPK Perwakilan Aceh tahun 2023 Jumlah UMKM terbanyak di Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar sejumlah 40.032 UMKM, kemudian di susul Bireuen sejumlah 38.511 UMKM, Aceh Tenggara sejumlah 38.490 UMKM, Banda Aceh sejumlah 34.449 UMKM, dan Pidie sejumlah 30.149 UMKM. Sementara itu, jumlah UMKM terendah berada di sabang 4.367 UMKM, Subulussalam 6.864 UMKM, Aceh Jaya 8.190 UMKM, Nagan Raya 9.575 UMKM, dan Aceh Singkil 9.774 UMKM. Jika setiap UMKM rata-rata menyerap 2 orang tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor UMKM ini bisa mencapai hampir 900 ribu orang. Namun, potensi UMKM di Aceh yang

sangat besar tersebut tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang cukup berat (Sasra, 2023).

Selain dilihat dari jumlah unit usaha, peran UMKM dalam perekonomian daerah juga dapat ditinjau melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu sektor yang banyak didominasi oleh aktivitas UMKM adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini mencerminkan aktivitas distribusi barang dan jasa yang sebagian besar dijalankan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, sektor perdagangan termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB di berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh. Oleh karena itu, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1.2
Distribusi PDRB ADHB Tahunan Menurut Lapangan
Usaha Periode 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Aceh, diolah (2026)

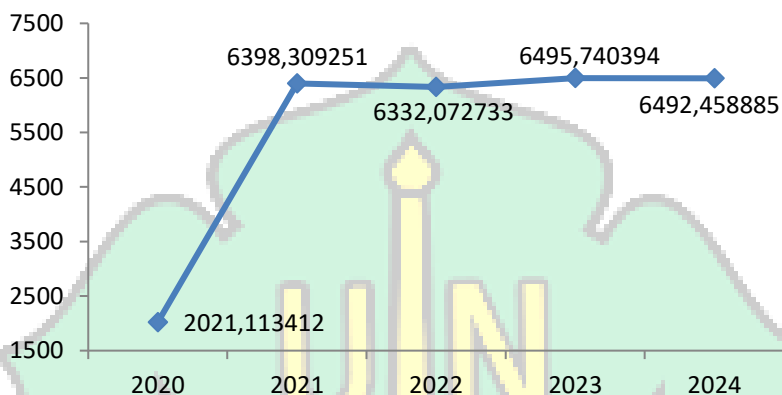
Berdasarkan gambar 1.2 Berdasarkan grafik distribusi PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Aceh periode 2020–2024, distribusi sektor ini bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2021, distribusi sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 0,49 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,30 poin persentase. Selanjutnya, pada tahun 2023 distribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan sebesar 1,17 poin persentase dan menjadi yang tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2024 distribusi sektor perdagangan kembali mengalami penurunan sebesar 0,18 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Fluktuasi distribusi tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan kategori perdagangan yang juga bergerak secara fluktuatif. Menurut

(BPS Aceh, 2025), pada tahun 2021 kategori perdagangan tumbuh sebesar 4,23 persen. Selain itu, subkategori perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 16,74 persen. Namun, pertumbuhan kategori perdagangan pada tahun-tahun berikutnya cenderung melambat, yaitu sebesar 6,29 persen pada tahun 2022 dan 3,74 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Aceh mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Bank syariah menggunakan pembiayaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan, usaha penyaluran dana yang paling besar dari lembaga keuangan bank, memiliki risiko kerugian yang tinggi tetapi juga peluang yang besar untuk mendapatkan laba. Dalam sistem perbankan syariah, aktivitas utamanya adalah menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, tentunya dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah Islam dalam seluruh kegiatan usahanya. Secara kelembagaan, bank syariah terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS lebih berfokus pada pemberian layanan pembiayaan skala kecil kepada masyarakat,

dengan tetap berlandaskan pada prinsip muamalah Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan.

Gambar 1.3
Pembiayaan Syariah Provinsi Aceh 2020-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: OJK, diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.3, terlihat bahwa Perkembangan pembiayaan syariah BUS, UUS, dan BPRS selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, pembiayaan syariah tercatat sebesar Rp2.021,11 miliar. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi Rp6.398,31 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2022 pembiayaan syariah sedikit menurun menjadi Rp6.332,07 miliar atau turun sekitar 1,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp6.495,74 miliar atau naik sekitar 2,58%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat kecil menjadi Rp6.492,46 miliar atau turun sekitar 0,05%.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah menunjukkan perkembangan yang positif selama periode penelitian.

Dalam konteks ini, Aceh memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik, terutama karena penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan di wilayah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kondisi ini menjadikan pembiayaan syariah sebagai instrumen keuangan yang sangat relevan dan strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam menjadikan pembiayaan syariah lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat dibandingkan pembiayaan konvensional. Dalam konteks perekonomian lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pengembangan UMKM di Aceh masih terkendala oleh keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Pembiayaan syariah menjadi solusi alternatif yang dapat memberikan modal usaha dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga UMKM dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Program kerja yang tepat akan mendorong bisnis daerah, tentunya untuk keuntungan wilayah itu sendiri dan bahkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, UMKM berperan penting dalam menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagian besar studi mengenai penyerapan tenaga kerja hanya berfokus pada variabel-variabel makro seperti inflasi, atau pertumbuhan ekonomi, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara Kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah sebagai dua sumber penggerak ekonomi yang potensial. Padahal di Aceh, keberadaan sistem keuangan syariah memiliki peran unik, terutama setelah diberlakukannya Qanun LKS. Namun, belum ada penelitian komprehensif yang menggabungkan analisis antara Kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah dalam satu model untuk melihat dampaknya terhadap tenaga kerja. Tingkat pengangguran di Aceh sebagai indikator lemahnya penyerapan tenaga kerja, karena ada beberapa faktor-faktor yang bisa memengaruhi penyerapan tenaga, pengembangan bisnis UMKM, kurangnya fokus pada konteks lokal Aceh, yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, termasuk dominasi sistem keuangan syariah. Karena itu, penting untuk melihat sejauh mana Kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh. Celah inilah yang ingin diisi dalam penelitian ini.

Solusi dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara kuantitatif pengaruh antara Kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan pendekatan ekonometrika, seperti regresi linier berganda dengan data time

series. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kontribusi masing-masing variabel terhadap peningkatan kesempatan kerja di Provinsi Aceh. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, seperti mengarahkan orang yang ingin berbisnis dalam UMKM serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke usaha produktif yang memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja lokal. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan peran kebijakan fiskal dan sistem keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan mampu mendorong sinergi antara para pebisnis dan sektor keuangan syariah dalam memberdayakan tenaga kerja lokal, sehingga dampak pembangunan tidak hanya terlihat dari sisi output ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara Kontribusi UMKM dengan pembiayaan syariah yang berpengaruh terhadap tenaga kerja. Seperti pada penelitian Suhada *et al* (2025) mengungkapkan bahwa secara parsial pembiayaan syariah berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM, Inovasi Sosial berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM dan Inklusi Sosial berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM dan secara simultan pembiayaan syariah, inovasi sosial dan inklusi sosial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM. Sementara itu, penelitian dari

Roswita & Rozali (2021) menunjukkan bahwa peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat dilihat dari perkembangan UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Gunawan *et al* (2025) menunjukkan bahwa Peran usaha kecil menengah dalam menyerap tenaga kerja pada usaha laundry di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, diketahui bahwa Usaha laundry mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, karyawan-karyawan yang sudah mampu mandiri, mencoba untuk membuka usahanya sendiri dengan modal kemitraan dengan beberapa teman yang sama-sama berpengalaman pada usaha laundry. Oleh karena itu, dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa daya serap tenaga kerja perlu diukur dalam pengembangan kontribusi umkm dan pembiayaan syariah. Penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut agar bisa mengatasi masalah terkait tenaga kerja dengan judul **“Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah terhadap Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh”**.

1.2 Masalah Penelitian

Beberapa masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kontribusi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh?

2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Secara Bersama-Sama Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah:

1. Untuk Mengetahui Kontribusi UMKM Mempengaruhi Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh
2. Untuk Mengetahui Pembiayaan Syariah Mempengaruhi Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh
3. Untuk Mengetahui Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Secara Bersama-Sama Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Di bawah ini adalah beberapa hal yang penulis harapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoristik: Penelitian ini bisa memperkaya literatur tentang peran UMKM dan pembiayaan syariah dalam perekonomian daerah, khususnya terkait dengan teori pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hasilnya dapat menjadi referensi akademis untuk pengembangan model atau kerangka teori baru tentang

hubungan antara Kontribusi UMKM, akses pembiayaan syariah, dan tenaga kerja.

2. Manfaat praktis: Bagi pelaku UMKM di Aceh, penelitian ini memberi gambaran bahwa semakin banyak Kontribusi UMKM dan semakin mudah akses ke pembiayaan syariah, semakin besar peluang terbukanya lapangan kerja. Bagi lembaga keuangan syariah, hasilnya bisa dipakai sebagai dasar strategi penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja usaha dan serapan tenaga kerja.
3. Manfaat kebijakan: Bagi pemerintah daerah maupun pusat, penelitian ini bisa jadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, termasuk peningkatan akses pembiayaan syariah. Kebijakan tersebut penting untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, penulis akan menyajikan sistematika penulisan yang jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menjelaskan alasan perlunya penelitian ini dilakukan serta menguraikan inti permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian, yang pada akhirnya akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Dalam bab ini berisi tentang teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Landasan teori pada bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai penguat dalam menganalisis pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian seperti termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi dan operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hal yang dimuatkan dalam bab ini berupa hasil proses analisis dan pengujian hipotesisnya serta hasil analisis dan pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, serta keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan objek dan tujuan penelitian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dibagian akhir terdapat daftar pustaka yang mencakup seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini serta lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

2.1.1 Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki individu atau badan usaha dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan jumlah tenaga kerja. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro , kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta, dan pelakunya usaha perorangan (Gunawan *et al.*, 2025). Dalam dunia ekonomi, usaha kecil merupakan bahan bakar bagi perkembangan ekonomi. Berkat kepemilikannya yang bersifat privat, semangat kewirausahaan yang fleksibel, serta kemampuannya beradaptasi dalam berbagai situasi yang menantang resiko dan ketidakpastian, UMKM akhirnya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Riska, 2020) dalam (Sari *et.al.*, (2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memang tidak dianggap sebagai faktor signifikan dalam roda perekonomian.

Pemerintah tidak menunjukkan perhatian khusus yang tertuang dalam kebijakan sebab dianggap bukan prioritas. Namun, selama satu dekade terakhir, usaha kecil telah menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa bagi pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah menjadi peran vital bagi perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi setempat, serta menghasilkan banyak inovasi dan kreasi. Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara (Halim, 2020) dalam (Sari *et.al.*, (2023)).

Melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.2.1 Teori UMKM

Menurut Zakiyah *et al* (2025) dalam buku *Pembiayaan Syariah*, Teori kewirausahaan (*entrepreneurship theory*) yang dikemukakan oleh Schumpeter (1934). Dalam teori ini, wirausahawan dipandang sebagai agen perubahan ekonomi yang berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha melalui inovasi.

Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan produk, peningkatan proses produksi, maupun perubahan model bisnis yang lebih efektif. Proses inovasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan mendorong perkembangan usaha menjadi lebih besar dan produktif. Seiring dengan meningkatnya kapasitas usaha, maka kebutuhan terhadap faktor produksi, terutama tenaga kerja, juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan output usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Inovasi → Pertumbuhan UMKM → Produksi meningkat → Tenaga kerja meningkat

2.3.1 Indikator UMKM

Menurut Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza 2010:13) dalam (Heryanti & Pasca, 2024) ada empat indikator UMKM yaitu :

1) Laba

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya produksi dan biaya operasional usaha.

2) Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan.

3) Tenaga Kerja

Tenaga Kerja merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha dan bertanggung jawab dalam

proses produksi maupun operasional usaha.

4) Modal

Modal merupakan dana atau sumber daya yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dan mendukung pengembangan usaha.

2.1.4 Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.5 Ciri- Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- a) Jenis barang atau komoditi yang digunakan perusahaan tidak tetap atau dapat berubah sewaktu-waktu
- b) Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
- c) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
- d) Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
- e) Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
- f) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
- g) Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.1.6 Jenis-Jenis UMKM

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

a) Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b) Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion juga sangat diminati. Setiap tahun, tren baru dalam mode muncul, meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c) Usaha Agribisnis

Bisnis pertanian tidak hanya memerlukan tanah yang luas. Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) dapat mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

2.1.7 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Sektor dan Aktivitas

Menurut Muttaqim Hakim (2025) dalam buku *Koperasi dan UMKM Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia*. Selain dikelompokkan berdasarkan ukuran usaha, UMKM juga dibagi sesuai dengan sektor usaha atau jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Klasifikasi ini penting dalam menyusun program pemberdayaan yang berlandaskan sektor.

a) Sektor Pertanian Dan Perikanan

Meliputi petani kecil, nelayan, pembudidaya ikan, peternak rakyat, serta usaha olahan hasil pertanian seperti keripik singkong, ikan asin, dan pupuk organik. Tantangan terbesar mereka adalah bergantung pada musim, akses teknologi, dan harga yang tetap stabil.

b) Sektor Perdagangan

UMKM di sektor ini mencakup pedagang kaki lima, warung, toko kelontong, toko online kecil, serta usaha grosir kecil. Dinamika permintaan dan persaingan harga menjadi tantangan yang besar.

c) Sektor Industri Pengolahan

Termasuk pengrajin batik, produsen makanan ringan, industri mebel, konveksi, dan usaha sablon. Mereka memiliki nilai tambah yang tinggi, tetapi membutuhkan modal yang lebih besar serta manajemen produksi yang lebih efisien.

d) Sektor Jasa

Termasuk usaha seperti salon, bengkel, fotokopi, laundry, jasa travel lokal, serta usaha UMKM yang berbasis digital seperti freelancer dan content creator. Sektor jasa berkembang pesat di era digital

2.1.8 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Formalitas dan Legalitas

a) UMKM Formal

Usaha yang memiliki dokumen resmi lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, izin usaha, serta rutin membuat laporan keuangan. Biasanya lebih mudah mendapat akses pembiayaan bank.

b) UMKM Informal

Usaha yang berjalan tanpa legalitas resmi. Meskipun memberi kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, mereka sulit diakses oleh kebijakan resmi pemerintah. Pembinaan UMKM informal menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun ekonomi yang inklusif.

2.1.9 Tantangan dan Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM Berdasarkan Klasifikasi

Menurut Muttaqim Hakim (2025) Setiap klasifikasi UMKM menghadapi tantangan spesifik. Oleh karena itu, strategi pengembangannya harus disesuaikan:

a) Untuk Usaha Mikro

Fokus pada peningkatan pemahaman tentang

keuangan, bantuan hukum dalam berbisnis, akses dana pembiayaan ultra mikro (UMi), serta pelatihan dasar berwirausaha.

b) Untuk Usaha Kecil

Perlu didorong dalam hal memperkuat sistem manajemen usaha, melakukan digitalisasi, memperluas pasar, serta terintegrasi ke dalam rantai pasok industri.

c) Untuk Usaha Menengah

Strateginya lebih rumit, mencakup pembiayaan investasi, masuk ke pasar ekspor, kerja sama industri, serta inovasi produk.

2.2 Pembiayaan Syariah

2.2.1 Definisi Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-undang Perbankan tahun 1998, pembiayaan berprinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu (Ahmadiono, 2021). Menurut Fitri (2015) dalam (Zakiyah et al., 2025) Pembiayaan dari sudut pandang ekonomi Islam secara istilah bisa diartikan sebagai cara lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada orang atau lembaga yang membutuhkan, seperti individu, perusahaan, atau pemerintah, dengan menggunakan jenis perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan

dari pembiayaan ini adalah untuk mendukung usaha atau penggunaan dana tanpa melibatkan hal-hal seperti riba, ketidakjelasan, atau keberuntungan. Secara umum, pembiayaan berarti memberikan uang atau modal untuk membantu suatu kegiatan ekonomi, baik dari orang pribadi maupun badan lembaga. Dari sudut pandang syariah, pembiayaan bukan hanya tentang menyediakan uang, tetapi juga memperhatikan sumber uang, cara penggunaannya, dan maksud dari pembiayaan tersebut (Zakiyah et al., 2025)

Menurut Antonio (2015), pembiayaan syariah adalah kegiatan memberikan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada orang lain, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, setiap kegiatan pembiayaan harus tidak mengandung unsur bunga, ketidakjelasan, dan kebetulan (judi). Bank Indonesia (2013) dalam modul edukasinya menjelaskan bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau kewajiban yang setara dengan itu, dalam bentuk transaksi berupa bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, serta jenis akad syariah lainnya. Dalam sistem ini, hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan tidak dianggap sebagai pihak yang meminjam dan memberi pinjaman, tetapi sebagai mitra yang bersama-sama membagi risiko dan manfaat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam ilmu fiqih, istilah yang digunakan untuk pembiayaan adalah al-tamwil al-islami, yang berarti cara mendanai

atau memberikan pinjaman sesuai dengan aturan agama Islam. Prinsip dasarnya adalah melarang bunga, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. "Padahal Allah telah memperbolehkan perdagangan dan melarang bunga." Dalam perbankan syariah, kata "pembiayaan" digunakan sebagai pengganti kata "kredit" yang umumnya digunakan dalam perbankan biasa. Ini menunjukkan perbedaan yang besar dalam cara kerja dan mekanisme antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan biasa. Jika dalam sistem konvensional lembaga keuangan bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman dengan bunga tertentu, dalam sistem syariah, lembaga keuangan berperan sebagai mitra bisnis atau pemilik barang yang bekerja sama dengan nasabah berdasarkan kesepakatan akad yang telah ditentukan (Zakiyah et al., 2025).

2.2.2 Teori Pembiayaan Syariah

Teori pembiayaan syariah menekankan bagi prinsip hasil yang adil dan pembagian risiko yang seimbang antara kedua belah pihak. Pembiayaan syariah berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar bagi UMKM karena dapat menghindari beban bunga yang sering kali menjadi penghalang bagi perkembangan UMKM dalam sistem keuangan konvensional (Azzam & Shalabi, (2018)) dalam (Julia & Firdaus, 2024). Selain itu, pembiayaan syariah mendorong UMKM untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan meningkatkan transparansi, karena mereka dituntut untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat.

Menurut Arifah *et al* (2024) dalam (Zakiyah *et al.*, 2025) Pembiayaan syariah bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah. Artinya, dana yang disalurkan harus digunakan untuk membuat, seperti usaha perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Sistem ini tidak mendorong konsumsi berlebihan atau aktivitas spekulatif. Prinsip produktivitas bertujuan agar pembiayaan syariah bisa menjadi penggerak penggerak ekonomi riil yang sehat, mendorong pembuatan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan pembangunan nasional. Berdasarkan teori manajemen keuangan, UMKM yang memiliki kinerja keuangan yang stabil dan sehat akan lebih mudah mendapatkan akses ke pembiayaan, baik dari bank konvensional maupun lembaga pembiayaan syariah (Yusuf, 2020 Julia & Firdaus, 2024).

2.2.3 Indikator Pembiayaan Syariah

Keberhasilan pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan usaha dapat dilihat dari peningkatan kinerja keuangan UMKM. Menurut Nasution & Rizkina (2022) Kinerja keuangan UMKM diukur melalui jumlah aset, omset atau volume penjualan, dan laba usaha yang diperoleh UMKM selama periode tertentu. Diantara indikator tersebut adalah sebagai berikut:

2) Aset

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas usaha dan dapat diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada

seberapa

cepat perkembangannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Memiliki potensi manfaat

dalam masa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa berupa hal-hal yang produktif.

menghasilkan kas ataupun setara kas. Manfaat lain dari aset adalah sebagai penghasil barang dan jasa tersebut dapat ditukar dengan barang atau aset lainnya serta digunakan untuk memenuhi kewajiban atau menghilangkan utang.

3) Omset atau Volume Penjualan

Omset atau volume penjualan akan meningkat jika didukung dengan kegiatan penjualan yang efektif. Omset berarti jumlah uang yang didapat dari penjualan, sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual barang atau jasa bertujuan mencari laba atau pendapatan. Jamal dkk (2013) menerangkan bahwa, “Omset Penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu yang dihitung sesuai dengan jumlah uang yang diterima.

4) Laba bersih

Laba bersih adalah kelebihan yang diperoleh setelah semua pendapatan dikurangi dengan semua beban yang ada, disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. Laba kotor adalah nilai keuntungan dari aktivitas transaksi

yang dilakukan, namun keuntungan tersebut belum dikurangi pajak penghasilan dan sebagainya. Rumus Laba Bersih: $\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha}$.

2.2.4 Karakteristik Pembiayaan Syariah

Beberapa karakteristik pembiayaan syariah antara lain:

- 1) Segala bentuk pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya pada berbagai transaksi yang diuraikan dalam fiqh muamalah.
- 2) Pembiayaan syariah merupakan skema akad kerjasama berupa jual beli atau sewa. Penetapan beragam skema ini merujuk kepada ketentuan transaksi dalam ajaran Islam.
- 3) Pembiayaan syariah memberi kesempatan kepada bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Perolehan pendapatan dari skema pembiayaan syariah tersebut berupa bagi hasil, margin dan ongkos sewa (*ujroh*).
- 4) Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan penyediaan dana dengan skema akad kerjasama, baik dalam bentuk penyediaan modal (*mudharabah*), maupun kerjasama dalam bentuk penyertaan modal (*musyarakah*).
- 5) Margin merupakan selisih harga antara harga beli dan harga jual suatu barang. Margin merupakan perolehan pendapatan bank syariah dari skema transaksi jual beli, baik itu berupa jual beli tangguh (*murabahah*),

maupun jual beli pesanan (salam dan istishna’).

- 6) Ujroh merupakan ongkos sewa. Ujroh menjadi sumber pendapatan bank syariah dari penyediaan barang sewa maupun fasilitas jasa lainnya. d. Perolehan pendapatan melalui pembiayaan syariah di atas merupakan alternative untuk keluar dari system bunga pada bank konvensional yang identik dengan praktek riba dan di larang dalam Islam..

2.2.5 Prinsip Dasar Syariah

Beberapa prinsip dasar yang melandasi pembiayaan dalam sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Penghindaran Riba

Menghindari bunga dan tingkat imbalan dari pinjaman atau utang adalah karakteristik yang paling umum dalam studi keuangan Islami. Menurut hukum Islam, pemberi pinjaman harus memberikan barang atau uang yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman selama periode tertentu tanpa meminta imbalan apa pun.

- 2) Jauh dari Gharar

Dalam keuangan Islam, menghindari gharar juga merupakan prinsip utama. Praktik gharar adalah ketika kontrak mengandung risiko atau ketidakpastian total tentang apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jika ada kekurangan informasi tentang nilai yang relevan, hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian atau eksploitasi

salah satu pihak. Bentuk lain dari praktek gharar adalah pendustaan, penipuan, dan pemberian informasi yang salah tentang nilai yang relevan.

3) Non Perjudian dan Permainan

Perjudian dan permainan juga dilarang oleh Islam. Dalam Islam, tidak diperbolehkan melakukan apa pun yang mengarah pada lotre atau spekulasi yang tidak terukur. Dalam hal lembaga keuangan, tindakan yang mengarah pada perjudian dan permainan ini terlihat pada kegiatan perdagangan berjangka berbasis, yang sangat umum di sistem perbankan konvensional.

2.2.6 Pembiayaan Berdasar Tujuan Penggunaannya

Menurut Zakiyah *et al* (2025) dalam buku *pembiayaan syariah* Berdasarkan pada tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat di bedakan pada kelompok sebagai berikut.

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya bank syariah membatasi pembiayaan konsumsi tersebut kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah, kendaraan dan sebagainya. Sumber kembali pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori jenis pembiayaan konsumtif antara lain;

- a) Pembiayaan perumahan; yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain dengan jaminan obyek yang dibiayai.
- b) Pembiayaan kendaraan bermotor; yaitu fasilitas pembiayaan di mana orang dapat membeli kendaraan roda dua atau roda empat dan menerima jaminan berupa kendaraan yang dibiayai.
- c) Pembiayaan multiguna; yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala kebutuhan konsumtif dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, serta tanah yang terkait dengan bangunan tempat tinggal.
- d) Kartu pembiayaan: Ini adalah sarana pembiayaan yang memungkinkan pengambilan tunai cepat dan kemudahan pembayaran. Semua transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada pemegang kartu. Setelah aplikasi permohonan kartu pembiayaan disetujui oleh bank bersangkutan, kartu pembiayaan diberikan kepada pemegang kartu.

2. Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis tertentu disebut pembiayaan produktif. Pembiayaan

produktif dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja, yang dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
- b) untuk memenuhi kebutuhan perdagangan atau meningkatkan nilai tempat suatu barang. Kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal, atau barang modal, berersta fasilitas yang erat kaitannya.

2.3 Penyerapan Tenaga Kerja

2.3.1 Definisi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah proses masuknya tenaga kerja ke dalam dunia kerja yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi. Penyerapan ini dapat terjadi baik di sektor formal seperti perusahaan, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara maupun di sektor informal seperti usaha kecil, perdagangan kaki lima, dan pertanian keluarga. Tingkat penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting untuk kinerja ekonomi suatu daerah. Tingkat yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Pangestu et al., 2025).

Kurva permintaan untuk faktor produksi memiliki kemiringan negatif. Namun lain halnya dengan permintaan

konsumen atas barang dan jasa, permintaan atas faktor produksi bergantung pada, dan dihasilkan dari, tingkat output dan biaya input perusahaan. Oleh karena itu, permintaan terhadap tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* (Pindyck & Rubinfeld (2014)) dalam (Hertomo, 2020). Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997) dalam (Hertomo, 2020) *derived demand* merupakan permintaan akan suatu faktor produksi yang disebabkan oleh adanya permintaan akan barang jadi yang dihasilkan oleh faktor produksi tersebut.

2.3.2 Teori Ketenagakerjaan

Menurut Pada teori neo-klasik Robert Solow tenaga kerja menjadi salah satu dari alat-alat yang memiliki peran penting digunakan dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja ialah individual seseorang yang memiliki kemampuan dan dukungan untuk melakukan pekerjaan serta dapat memproduksi barang serta jasa untuk mendukung kehidupan mereka atau untuk dijual. Konsumsi masyarakat adalah definisi dari tenaga kerja berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003. Pendefinisian lain mengenai tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia produktif dan siap untuk bekerja memproduksi barang dan jasa. Sedangkan berbeda dengan ketenagakerjaan yaitu individu atau orang yang terkait dengan tenaga kerja yang tidak ada batasan usia, namun tidak boleh mengpekerjakan anak-anak selama itu mereka berada di kategori bukan tenaga kerja (Utami et al., 2019).

Teori Klasik Adam Smith (1729-1790) menganggap bahwa manusia adalah faktor utama dalam produksi yang

memengaruhi tingkat kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam atau tanah tidak memiliki makna jika tidak diolah oleh manusia yang cerdas sehingga bisa memberi manfaat bagi hidup manusia. Smith juga melihat bahwa penempatan sumber daya manusia secara efektif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi berkembang, modal baru (fisik) mulai diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung. Dengan kata lain, alokasi tenaga kerja yang baik adalah syarat wajib untuk pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan betapa pentingnya pembagian kerja dalam memajukan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Ia menghemat waktu, bisa menemukan mesin yang baru dan berbagai cara baru dalam membuat produk. Akhirnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Namun, pembagian tugas bergantung pada ukuran pasar (Hafni Roswita & Ahmad, 2020).

2.3.3 Indikator Penyerapan Tenaga Kerja

Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penyerapan tenaga kerja:

1. Kesempatan kerja

Menurut Saputra Erick Permana (2016) Kerja yang tersedia adalah kondisi di mana ada posisi pekerjaan yang bisa diisi oleh orang yang sedang mencari pekerjaan. Namun bisa juga diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja adalah suatu peluang yang

harus dimanfaatkan diperjuangkan oleh para pencari kerja agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup dengan cara yang layak, serta membuat diri dan keluarganya hidup lebih bahagia dan sejahtera. Banyak orang berusaha menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar bisa bersaing dalam dunia kerja.

Tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting dalam berjalan lancarnya perekonomian kota. Dengan adanya tenaga kerja, maka kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan lancar seperti yang semestinya. Sumber daya manusia secara alami berkembang melalui peningkatan kemampuan dan keahlian mereka. Prestasi yang dicapai oleh setiap individu adalah jaminan untuk menghadapi setiap tantangan dalam dunia kerja. Prestasi semacam itu pasti bisa memengaruhi kemajuan suatu daerah dan bahkan bisa terasa hingga di masa depan.

Kesempatan kerja dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$AK = \text{Penduduk bekerja} + \text{Menganggur}$$

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Hasanah, 2022).

1. Faktor Eksternal, meliputi:

a) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak

kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Akibatnya, permintaan tenaga kerja meningkat karena perusahaan butuh tambahan tenaga untuk memenuhi peningkatan output. Jadi, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.

b) Tingkat Inflasi

Inflasi yang terlalu tinggi bisa bikin biaya produksi naik (misalnya karena harga bahan baku dan upah naik). Kalau biaya ini meningkat, perusahaan bisa mengurangi jumlah pekerja agar tetap efisien. Tapi kalau inflasi masih dalam batas wajar, justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

c) Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi menandakan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam konteks kebijakan, pemerintah akan berusaha menurunkan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi, pengangguran bisa menjadi indikator penting yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi dan sektor ketenagakerjaan.

d) Tingkat Bunga.

Tingkat bunga yang tinggi bikin dunia usaha enggan meminjam modal dari bank, karena biaya pinjamannya besar. Akibatnya, investasi menurun dan pembukaan lapangan kerja baru juga berkurang. Sebaliknya, kalau

bunga rendah, investasi meningkat dan penyerapan tenaga kerja pun cenderung naik.

Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal.

2. Faktor Internal, meliputi:

a) Tingkat Upah

Tingkat upah berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Kalau upah terlalu tinggi, perusahaan mungkin akan menekan jumlah pekerja untuk mengurangi biaya produksi. Tapi kalau upah terlalu rendah, bisa menurunkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja. Jadi perusahaan harus menyesuaikan tingkat upah agar tetap menarik bagi pekerja tapi juga tidak membebani keuangan perusahaan.

b) Produktivitas Tenaga Kerja

Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin efisien proses produksi. Perusahaan yang produktivitasnya tinggi biasanya mampu menghasilkan output lebih besar tanpa harus menambah banyak tenaga kerja baru. Tapi di sisi lain, produktivitas yang meningkat juga bisa membuka peluang perluasan usaha, sehingga tetap berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.

c) Modal

Modal adalah faktor penting untuk membiayai kegiatan

produksi dan memperluas usaha. Kalau perusahaan punya cukup modal, mereka bisa membeli peralatan baru, memperluas pabrik, atau membuka cabang baru yang semuanya butuh tambahan tenaga kerja. Jadi, semakin besar modal yang tersedia, semakin besar juga potensi penyerapan tenaga kerja.

d) Pengeluaran Non Upah.

Ini mencakup biaya lain yang dikeluarkan perusahaan selain gaji, seperti tunjangan, pelatihan, asuransi, dan fasilitas kerja. Semakin besar pengeluaran non upah, semakin tinggi total biaya tenaga kerja, yang bisa bikin perusahaan lebih hati-hati dalam merekrut. Tapi kalau dikelola dengan baik, pengeluaran non upah justru bisa meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas pekerja, sehingga produktivitas juga naik.

Dengan melihat keadaan tersebut maka dalam mengembangkan sektor industri kecil dapat dilakukan dengan menggunakan faktor internal. Kedua kelompok faktor tersebut, baik eksternal maupun internal, saling berhubungan dan bersama-sama memengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Ketika faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga cenderung meningkat karena adanya ekspansi kegiatan produksi dan investasi. Sementara itu, faktor internal seperti tingkat upah, modal, serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja turut

menentukan sejauh mana perusahaan mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini pada dasarnya mencerminkan semakin luasnya kesempatan kerja yang terbuka bagi masyarakat. Semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap, maka semakin tinggi pula partisipasi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar peluang kerja dapat tercipta secara berkelanjutan.

2.3.5 Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja (Juliana, 2024). Angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dengan pengertian bahwa semakin banyak partisipasi angkatan kerja yang bekerja, akan meningkatkan tingkat produksi yang akhirnya akan berimbas pada naiknya pertumbuhan ekonomi. TPAK tidak hanya berfungsi sebagai ukuran tingkat partisipasi tenaga kerja, tetapi juga menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi. TPAK yang meningkat menunjukkan adanya pertumbuhan kesempatan kerja, peningkatan

kesejahteraan, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sebaliknya, TPAK yang rendah dapat menjadi sinyal adanya hambatan dalam penciptaan lapangan kerja, rendahnya motivasi untuk bekerja, atau ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Daerah dengan sektor ekonomi yang dinamis dan beragam cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan TPAK memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika TPAK menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran di tingkat regional maupun nasional.

2.3.6 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap tingkat upah yang mungkin selama periode waktu tertentu. Ini karena hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ingin dipekerjakan oleh pemberi kerja (Utami Try Wahyu et al., 2023). Pada dasarnya, permintaan tenaga kerja bergantung pada tenaga kerja itu sendiri, dan tenaga kerja harus menyesuaikan dengan

apa yang dibutuhkan oleh perusahaan nantinya, oelh karena itu tenaga kerja harus mempersiapkan dirinya maupun softskill dan hardskill tenaga kerja itu sendiri. Permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja (*demand for labor*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja yang perlu diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah jumlah pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah diisi maupun jumlahnya lapangan kerja yang masih kosong. Menurut Haryani (2002) dalam (Sembiring, 2015) jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja ditentukan oleh faktor-faktor seperti:

1) Tingkat Upah

Tingkat upah akan memengaruhi besarnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk tersebut dihasilkan. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang juga bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Penurunan jumlah karyawan karena perubahan tingkat produksi disebut efek skala produksi (*scale effect*). Jika upah meningkat tetapi harga bahan-bahan modal tetap, para pengusaha biasanya lebih memilih menggunakan mesin daripada pekerja manusia. Penurunan jumlah pekerja karena digantikan oleh mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*).

2) Teknologi

Yang paling berpengaruh dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja ini adalah kemampuan mesin untuk membuat barang dalam jumlah yang sangat banyak, jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa dilakukan manusia.

3) Produktivitas

Produktivitas adalah cara mengukur seberapa besar hasil yang diperoleh dibandingkan dengan semua sumber daya yang digunakan dalam satu waktu tertentu. Peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah tujuan yang penting karena peningkatan produktivitas faktor lainnya sangat bergantung pada kemampuan tenaga manusia dalam menggunakan faktor tersebut (Sumarsono, 2003) dalam (Sembiring, 2015). Jumlah pekerja yang dibutuhkan bisa ditentukan oleh seberapa tinggi produktivitas pekerja tersebut.

4) Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas tenaga kerja ini terlihat dari tingkat pendidikan mereka keterampilan, pengalaman, dan kemampuan kerja yang matang dari tenaga kerja.

5) Fasilitas Modal

Dalam sebuah industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi lainnya tetap tidak berubah. Jika modal yang ditanamkan terus bertambah, maka kebutuhan akan tenaga kerja juga akan meningkat.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja (Sumarsono, 2009) dalam (Sembiring, 2015):

- a) Permintaan pasar naik dan turun tergantung pada hasil produksi perusahaan tersebut. Jika permintaan terhadap hasil produksi perusahaan naik, produsen biasanya memperbesar kapasitas produksi mereka. Untuk tujuan itu, produsen akan meningkatkan jumlah karyawan yang digunakan.
- b) Jika harga barang-barang modal berkurang, maka biaya produksi juga berkurang, dan secara alami hal ini menyebabkan harga jual per unit barang turun pula. Dalam kondisi ini, produsen cenderung meningkatkan produksi barangnya karena permintaan semakin besar. Selain itu, permintaan akan tenaga kerja juga bisa meningkat karena aktivitas perusahaan semakin bertambah. Efek berikutnya yang terjadi ketika harga barang-barang modal berkurang adalah efek substitusi. Kondisi ini bisa terjadi karena produsen umumnya memperbanyak jumlah mesin sehingga proses produksi menjadi lebih mengandalkan modal. Jadi secara relatif, penggunaan tenaga kerjanya menjadi lebih sedikit.

Tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi, digabungkan dengan faktor-faktor produksi lainnya, terutama modal, sehingga dapat menghasilkan output berupa barang dan jasa. Oleh karena itu, perusahaan dalam melakukan produksi memerlukan bantuan tenaga kerja,

dengan asumsi perusahaan menggunakan tenaga kerja sebagai faktor produksi untuk menghasilkan outputnya.

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Keterkaitan Antar Kontribusi UMKM Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kontribusi UMKM dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang erat karena aktivitas UMKM berperan dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah. Dalam penelitian ini, kontribusi UMKM diproksikan melalui nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang dianggap merepresentasikan aktivitas UMKM. Semakin besar kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah, maka semakin tinggi pula aktivitas produksi dan distribusi yang berlangsung di dalamnya. Peningkatan nilai tambah pada sektor perdagangan menunjukkan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa yang mendorong pelaku usaha untuk memperluas skala usahanya. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, karena sektor yang didominasi oleh UMKM cenderung bersifat padat karya. Dengan demikian, kenaikan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, peningkatan kontribusi sektor perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan tenaga kerja yang proporsional. Efisiensi usaha, penggunaan teknologi, serta skala usaha yang masih

relatif kecil dapat memengaruhi besarnya tenaga kerja yang diserap. Oleh karena itu, hubungan antara kontribusi UMKM dan penyerapan tenaga kerja tetap perlu diuji secara empiris untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kesumawati & Fisabilillah (2024) yang menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB mampu mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Dalam konteks penelitian ini, kontribusi UMKM diprosikan melalui nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merepresentasikan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya, peningkatan nilai tambah sektor yang didominasi UMKM berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, besarnya pengaruh tersebut tetap bergantung pada kualitas pertumbuhan sektor, tingkat produktivitas, serta dukungan kebijakan yang mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan.

2.4.2 Keterkaitan Antar Pembiayaan Syariah Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja karena dana yang disalurkan oleh bank syariah digunakan untuk kegiatan produktif di sektor riil, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil. Ketika pelaku usaha memperoleh pembiayaan dari bank syariah, modal

tersebut digunakan untuk memperluas kapasitas usaha, membeli bahan baku, atau menambah peralatan produksi. Perluasan kegiatan usaha ini akan menimbulkan kebutuhan tenaga kerja tambahan sehingga mampu menyerap lebih banyak pekerja.

Hasil penelitian Dermawan *et al* (2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah, semakin tinggi pula tingkat kesempatan kerja yang tercipta. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, maka pendapatan masyarakat juga ikut meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitas pembiayaan syariah dalam menciptakan lapangan kerja juga bergantung pada sektor penerima pembiayaan. Jika pembiayaan lebih banyak disalurkan kepada sektor-sektor padat modal, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja bisa relatif kecil. Sebaliknya, jika pembiayaan diarahkan ke sektor padat karya seperti UMKM, maka kontribusinya terhadap peningkatan tenaga kerja akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, keterkaitan antara pembiayaan syariah dan penyerapan tenaga kerja bersifat positif, tetapi sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pembiayaan dan karakteristik sektor usaha penerima dana.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait atau tinjauan pustaka memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan kerangka perbandingan dan referensi

yang merinci hasil-hasil penelitian sebelumnya, terutama terkait dengan dinamika tenaga kerja. Berdasarkan hasil kajian literatur yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik jumlah UMKM, pembiayaan syariah, dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh maupun di wilayah lain di Indonesia, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaan tersebut terletak pada penggunaan variabel yang serupa, sementara perbedaannya terlihat dari lokasi penelitian, periode waktu, serta metode analisis yang digunakan. Beberapa perbedaan penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti, Tahun Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurjannah & Muslihat (2024) “Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat”	Kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari BPS tahun 2017-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran dominan dalam menyerap tenaga kerja di Jawa Barat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah UMKM, penyerapan tenaga kerja juga meningkat secara signifikan	Sama-sama meneliti pengaruh atau hubungan jumlah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja.	Lokasi penelitian di Jawa Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
2.	Lestari & Sutanty	Kuantitatif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan	Sama-sama membahas	Lokasi penelitian di

	(2023) “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa”	analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji determinasi (R^2)	bahwa tingkat penjualan dan tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara parsial maupun simultan. Kemampuan kedua variabel tersebut dalam menjelaskan penyerapan tenaga kerja sebesar 74,1%.	faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM.	Kabupaten Sumbawa, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dan menambahkan variabel pembiayaan syariah.
3.	Zana Zein Hardimanto, Rahmadani Syafiah, Azzahra, Nova Adisti Maharani Ramadhan & Farida Nur Amalina (2025) “Analisis Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja UMKM di Indonesia: Peran PDB UMKM, Suku Bunga, Dan Upah Minimum”	Kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan data panel 38 provinsi di Indonesia (2018-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan.	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM	Penelitian Zana Zein et.al (2025) menambahkan variabel makroekonomi (PDB, Suku Bunga, Upah Minimum), sedangkan penelitian ini fokus pada jumlah UMKM dan pembiayaan syariah di Provinsi Aceh.
4.	Aliyah & Auwalin (2020)	Kuantitatif dengan pendekatan	Pembiayaan bank syariah tidak	Sama-sama meneliti hubungan	Lokasi penelitian tersebut di

	“Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL)”	n Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menggunakan data time series 2004-2018	berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMKM, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, inflasi dan PDB berpengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah unit UMKM berpengaruh negatif signifikan terhadap tenaga kerja UMKM.	pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM	tingkat nasional, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Provinsi Aceh dan menambahkan variabel jumlah UMKM secara spesifik sebagai faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.
5.	Tri Irawan & Mulyany (2020) “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)”	Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Wilcoxon Signed Rank Test terhadap 93 responden nasabah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan laba, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja pada UMKM setelah menerima pembiayaan syariah dari BPRS Hikmah Wakilah. Artinya, pembiayaan syariah berperan signifikan dalam pengembangan usaha UMKM	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap peningkatan tenaga kerja dan perkembangan UMKM	Penelitian tersebut berfokus pada pembiayaan syariah di satu lembaga (BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji pembiayaan syariah secara

					agregat dari BUS,UUS, dan BPRS di Provinsi Aceh.
6.	Putri (2021) “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan penting dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya dalam mengatasi keterbatasan modal yang menjadi hambatan utama pelaku usaha. Pembiayaan syariah memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya melalui prinsip bagi hasil.	Sama-sama meneliti hubungan antara pembiayaan syariah dan pengembangan UMKM yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.	Penelitian tersebut bersifat deskriptif kualitatif secara nasional, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada Provinsi Aceh serta menambahkan variabel jumlah UMKM.
7.	Miftahul Jannah & Fifi Afyanti (2024) “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Peningkatan	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan data sekunder Bank Indonesia dan BPS periode 2015-2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, dan secara tidak langsung meningkatkan	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui peran UMKM.	Penelitian tersebut berskala nasional dan meneliti efek tidak langsung melalui variabel mediasi (UMKM), sedangkan penelitian yang

	UMKM di Indonesia”		penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan syariah mampu memperkuat sektor riil melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.		dilakukan penulis fokus di Provinsi Aceh dengan variabel langsung antara pembiayaan syariah, jumlah UMKM, dan penyerapan tenaga kerja.
8.	Tika Rahmawati, M. Khoirul Anwar & Firda Rizqina (2024) “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor UMKM di Indonesia”	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan data OJK dan BPS periode 2016-2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Artinya, peningkatan jumlah pembiayaan syariah dapat mendorong ekspansi usaha yang berujung pada peningkatan lapangan kerja.	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja	Penelitian tersebut berskala nasional dan hanya fokus pada pembiayaan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menambahkan variabel jumlah UMKM serta berfokus di Provinsi Aceh
9.	Bradford Cristofer Zainal, Een N.	Kuantitatif dengan analisis data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah unit UMKM dan	Sama-sama membahas hubungan antara	Penelitian tersebut fokus pada empat kota

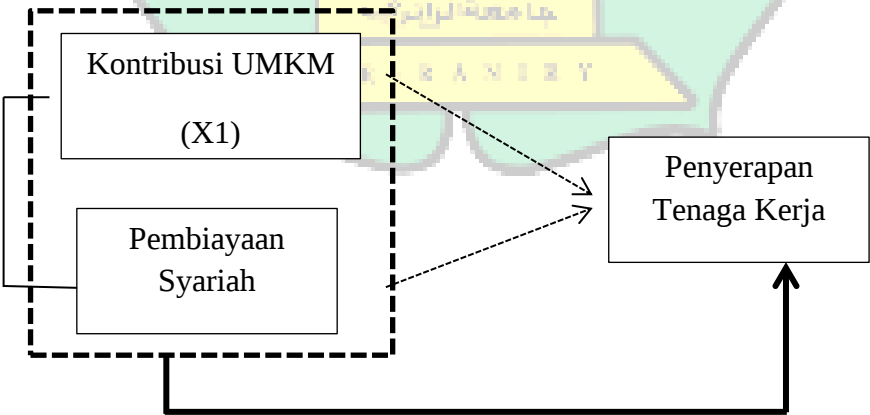
	Walewangko & Hanly F. Dj. Siwu (2023) “Pengaruh Jumlah Unit UMKM dan Tenaga Kerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, Tomohon, Bitung, dan Kotamobagu”	menggunakan model Random Effect (REM)	jumlah tenaga kerja UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, jumlah unit UMKM tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	jumlah UMKM dan tenaga kerja terhadap perekonomian daerah	di Sulawesi Utara dan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus di Provinsi Aceh dengan variabel penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen utama.
10.	Noka (2019) “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syaria’ah (BPRS) Gayo terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif etnografi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BPRS Gayo efektif meningkatkan pendapatan, kestabilan usaha, dan kesejahteraan masyarakat penerima pembiayaan di Aceh Tengah.	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap penguatan sektor UMKM dan dampaknya pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus

					pada pengaruh jumlah UMKM serta pembiayaan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.
--	--	--	--	--	---

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka teoritis yang diterapkan, variabel dalam penelitian ini akan direpresentasikan oleh Jumlah UMKM (X1) dan Pembiayaan Syariah (X2) sebagai variabel independen, sementara penyerapan tenaga kerja (Y) akan berperan sebagai variabel terikat. Dengan konsep ini, penelitian akan mengkaji sejauh mana dampak variabel tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Namun, karena memerlukan pengujian empiris, hipotesis tidak dapat mencapai kesimpulan yang signifikan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan masalah dan tujuan penelitian adalah:

H_{01} : Kontribusi UMKM tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

H_{a1} : Kontribusi UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

H_{02} : Pembiayaan Syariah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

H_{a2} : Pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

H_{03} : Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

H_{a3} : Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian asosiatif yang umumnya digunakan untuk mempelajari secara khusus karakteristik suatu populasi atau sampel yang tidak dapat dipahami. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan alat penelitian dan melakukan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menyelidiki hipotesis yang dirumuskan secara intuitif (Sugiyono, 2023)

3.2 Jenis dan Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang diperoleh dari sumber atau lembaga terkait seperti data dari instansi atau dokumen resmi, BPS, dan laporan tahunan. Data sekunder yang digunakan berupa Times Series dengan periode tahun 2008-2024. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Data Kontribusi UMKM pada Aceh tahun 2008-2024. Data ini diperoleh dari Pusat Statistik (BPS) dimana data Kontribusi UMKM diproksikan menggunakan nilai PDRB menurut lapangan usaha.
4. Data Pembiayaan Syariah tahun 2008-2024. Data ini bersumber dari data OJK.

5. Data Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2008-2024. Data ini bersumber dari data BPS Aceh.

Menurut Jenkins & Quintana-Ascencio (2020) menyatakan, bahwa jumlah sampel minimum sebanyak 8 observasi sudah memberikan informasi yang memadai apabila data memiliki variasi yang sangat rendah, sedangkan jumlah sampel minimal 25 observasi diperlukan apabila data memiliki variasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Randahl (2025) menjelaskan bahwa aturan penggunaan minimal 30 observasi merupakan salah satu *rule of thumb* yang paling umum digunakan dalam analisis statistik. Namun, penelitian yang sama juga menyatakan bahwa salah satu variabel memiliki distribusi yang simetris, maka ukuran sampel sebanyak 10 hingga 20 observasi sudah dapat menghasilkan inferensi yang dapat dipercaya dalam analisis regresi. Meskipun demikian, Randahl (2026) menegaskan bahwa penggunaan ukuran sampel yang kecil tetap harus mempertimbangkan karakteristik data dan kekuatan statistik agar hasil analisis yang diperoleh tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2023) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan

dapat dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu memperoleh data dari dokumen dan publikasi resmi yang telah tersedia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah, yaitu data kontribusi UMKM dan penyerapan tenaga kerja dari Badan Pusat Statistik, serta data pembiayaan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa variabel penelitian merujuk pada suatu atribut atau sifat atau nilai darorang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian mencakup segala hal yang menjadi fokus penelitian dan dapat berpengaruh terhadap riset tersebut.

3.4.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2023) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam studi ini, variabel independen yang digunakan adalah variabel yang mampu menimbulkan perubahan pada variabel lainnya.

3.4.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2023) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas. Di dalam kajian ini, variabel terikat yang digunakan adalah variabe yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sugiyono (2023) menyatakan bahwa penjelasan operasional variabel adalah penjelasan tentang karakteristik atau nilai dari objek, orang, atau tindakan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan membuat kesimpulan. Penjelasan ini digunakan untuk menjelaskan makna variabel yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Sumber data	Skala
1.	Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja di Provinsi Aceh terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Penelitian ini menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator yang merepresentasikan penyerapan tenaga kerja.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh	Rasio (Persentase)
2.	Kontribusi UMKM (X ₁)	Kontribusi UMKM (X ₁) adalah kontribusi aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian daerah yang diprosikan	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh	Rasio (Persentase)

		menggunakan nilai distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha yang merepresentasikan aktivitas UMKM di Provinsi Aceh periode 2008–2025		
3.	Pembiayaan Syariah (X_2)	Penyaluran dana oleh BUS,UUS &BPRS kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, pembiayaan syariah diukur menggunakan total pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh BUS,UUS&BPRS secara agregat di Provinsi Aceh.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Nominal

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Metode Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2021) menyatakan bahwa studi kuantitatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada nilai dan besaran data dan menggunakan analisis kuantitatif sebagai metode utama. Dalam analisis kuantitatif, prosedur analisis data yang digunakan secara utama adalah kuantitatif dan statistik. Sebagai contoh, uji hipotesis awal menilai potensi pengaruh variabel bebas (X). Ini adalah tahap yang diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, analisis regresi liner berganda. Uji hipotesis klasik dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Uji Normalitas

Ghozali (2021) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan sebaran kumulatif data aktual dengan sebaran kumulatif yang berdistribusi normal. Data normal berbentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi Lilliefors. Penilaian normalitas adalah sebagai berikut.

- a) Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- b) Jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2021) mengatakan bahwa uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel

ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variace inflation factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance dibawah 0,10 maka terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastissitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskesdastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati hubungan antara gangguan pada model regresi linier berganda dari satu periode ke periode berikutnya dan kesalahan pada periode sebelumnya. Metode faktor rasio inflasi digunakan untuk mengevaluasi autokorelasi dalam penelitian ini. Ini memperhitungkan ambang batas pada tingkat 0,10 (Ghozali, 2021)

3.7 Analisis Data

Analisis data meliputi pengujian data yang diperoleh dari hasil tanggapan yang diterima dari responden untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis regresi linier berganda memperkirakan besar kecilnya koefisien yang dihasilkan sebesar. Koefisien-koefisien ini bersifat linier dan mencakup dua variabel independen yang digunakan sebagai prediktor besar kecilnya nilai variabel dependen. Regresi linier berganda yaitu regresi yang terdapat beberapa variabel penjelas atau independen, digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu variabel dependen. Secara umum, persamaan model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = *error term* atau residual

3.8 Pengujian Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2023). Uji koefisien determinasi (R^2), koefisien regresi parsial (T), dan koefisien regresi secara bersama-sama (F) disertakan dalam uji statistik ini.

3.8.1 Uji Parameter Individu (Uji T)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas (X) memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai t hitung $\leq t$ tabel, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, artinya

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

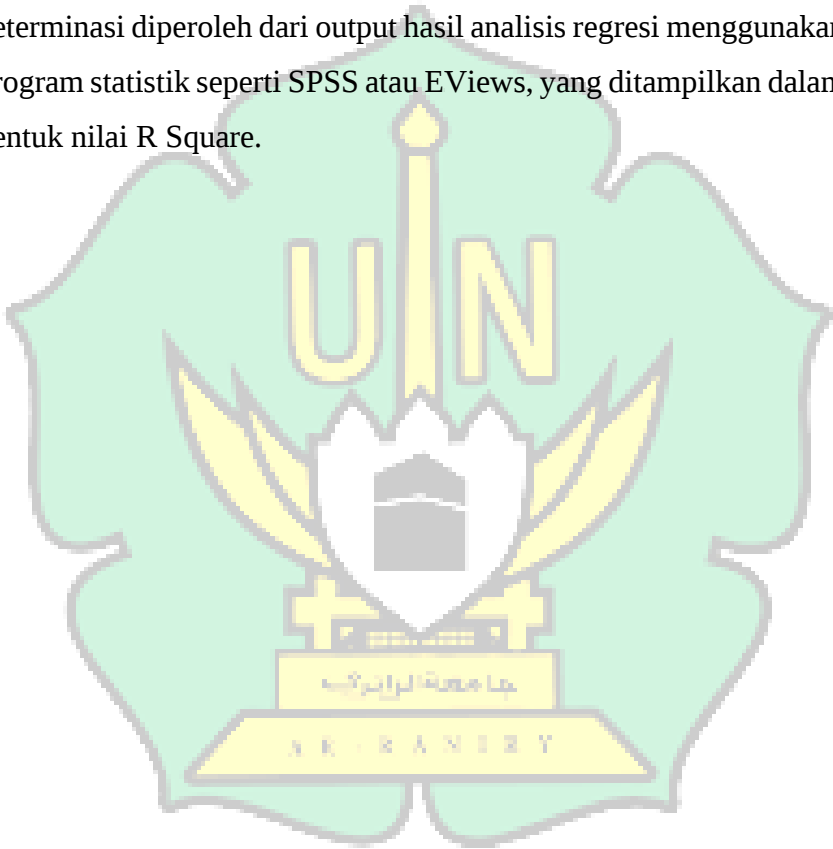
Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 95 % atau 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai F hitung $\leq F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2023) Koefisien determinasi, yang disimbolkan dengan R^2 , adalah parameter yang signifikan dalam analisis regresi, memegang peran krusial dalam menilai kualitas model regresi yang diestimasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat. Nilai R^2 menunjukkan proporsi atau persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Apabila nilai R^2 mendekati 1, maka model regresi yang digunakan dianggap baik karena variabel bebas mampu menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat tergolong lemah. Secara matematis, nilai koefisien determinasi diperoleh dari output hasil analisis regresi menggunakan program statistik seperti SPSS atau EViews, yang ditampilkan dalam bentuk nilai R Square.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian



Sumber: PaintMaps Google

Berdasarkan Gambar 4.1 Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung paling barat Indonesia dan secara geografis berada di Pulau Sumatra. Aceh berbatasan langsung dengan Laut Andaman di sebelah utara dan timur, Samudera Hindia

di sebelah barat dan selatan, serta Provinsi Sumatera Utara di sebelah tenggara. Posisi strategis ini menjadikan Aceh sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi, perdagangan, dan sumber daya alam yang cukup besar. Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota, yang mencakup 18 kabupaten dan 5 kota. Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh antara lain Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Sementara itu, kota-kota di Provinsi Aceh terdiri dari Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam. Setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, hingga industri kecil dan menengah. Sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian daerah serta memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah cabang statistik yang focus dalam pengumpulan, penyajian, dan penguraian data agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat mengenai berbagai hal karakteristik data. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk merangkum, meringkas, dan mengorganisir data sehingga orang dapat lebih mudah memahami dan tertarik kesimpulan dari informasi

yang terkandung dalam data tersebut (Iba & Wardhana, 2023). Berikut hasil dari pengujian deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	14.78588	2477.567	63.38471
Median	14.79000	1463.519	63.50000
Maximum	16.08000	6495.740	65.11000
Minimum	13.39000	302.9280	60.32000
Std. Dev.	0.833899	2402.276	1.230239

Sumber: Data Diolah, (2026)

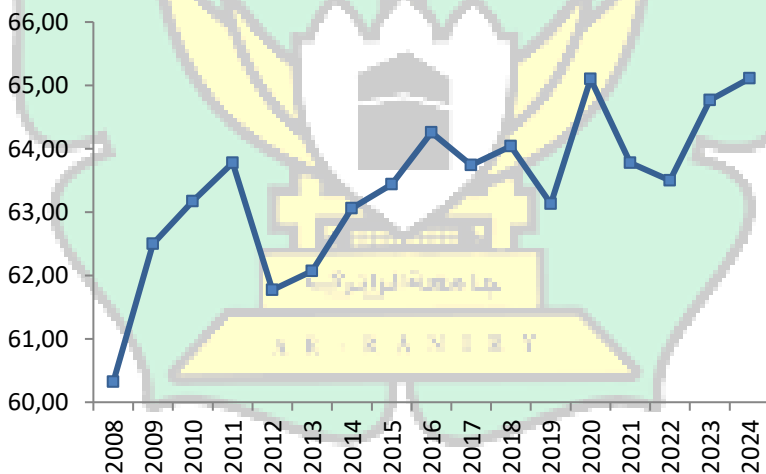
4.2.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Aceh

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi, salah satunya adalah kondisi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Aceh, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu indikator yang penting untuk diamati karena berkaitan dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan Tabel 4.1 yang mencakup 17 sampel observasi, dapat dilihat beberapa statistik deskriptif mengenai variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Penyerapan

tenaga kerja memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 60,32000, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 65,11000. Selanjutnya, nilai rata-rata (mean) penyerapan tenaga kerja sebesar 63,38471, sedangkan nilai tengah (median) sebesar 63,50000. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 1,230239 menunjukkan bahwa variasi data penyerapan tenaga kerja selama periode penelitian relatif rendah, sehingga penyebaran data cenderung berada di sekitar nilai rata-ratanya. Di bawah ini disajikan grafik perkembangan penyerapan tenaga kerja yang diukur menggunakan TPAK di Provinsi Aceh:

Gambar 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh
(2008-2024) (Persen)



Sumber: BPS Aceh, (2024)

Dapat dilihat pada Gambar 4.2 bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh periode 2008–2024 mengalami fluktuasi. Secara umum, TPAK menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun pada beberapa tahun

mengalami penurunan. Pada periode 2008–2011 terjadi peningkatan TPAK, kemudian menurun pada tahun 2012. Selanjutnya, TPAK kembali meningkat pada periode 2013–2016, namun mengalami fluktuasi pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020 TPAK meningkat dan mencapai salah satu nilai tertinggi selama periode penelitian. Memasuki tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan, yang diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 TPAK kembali mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, perkembangan TPAK di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pasar kerja cenderung membaik dari tahun ke tahun, meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi yang menyebabkan terjadinya fluktuasi. Peningkatan TPAK mencerminkan semakin besarnya penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, sedangkan penurunan TPAK menunjukkan berkurangnya partisipasi angkatan kerja yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesempatan kerja, maupun faktor sosial lainnya.

4.2.2. Perkembangan Kontribusi UMKM di Provinsi Aceh

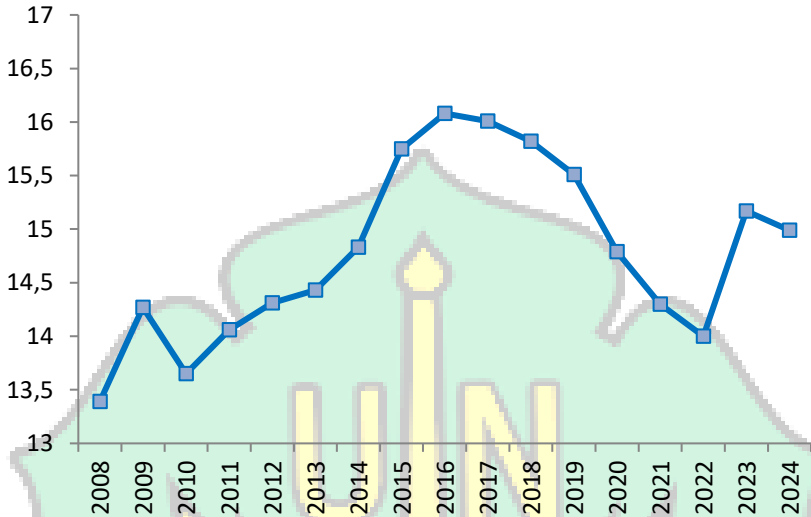
Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, keberadaan UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif

yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kontribusi UMKM menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, kontribusi UMKM diukur menggunakan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Aceh. Sektor tersebut dipilih karena sebagian besar aktivitas UMKM bergerak pada bidang perdagangan, sehingga dapat mencerminkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, kontribusi UMKM menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Tabel 4.1 yang mencakup 17 sampel observasi, variabel kontribusi UMKM memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 13,39000, nilai tertinggi (maximum) sebesar 16,08000, nilai rata-rata (mean) sebesar 14,78588, nilai median sebesar 14,79000, serta nilai standar deviasi sebesar 0,833899. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data kontribusi UMKM selama periode penelitian relatif rendah sehingga data cenderung berada di sekitar nilai rata-ratanya. Berikut ini adalah data grafik kontribusi UMKM di Provinsi Aceh:

Gambar 4.3

Kontribusi UMKM di Provinsi Aceh (2008-2024) (Persen)



Sumber: BPS Aceh, (2024)

Dapat dilihat pada Gambar 4.3 bahwa kontribusi UMKM di Provinsi Aceh periode 2008–2024 mengalami fluktuasi. Secara umum, kontribusi UMKM menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2016, meskipun pada beberapa tahun mengalami penurunan. Pada periode 2008–2009 kontribusi UMKM mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2010. Selanjutnya, kontribusi UMKM kembali meningkat secara bertahap pada periode 2011–2016 hingga mencapai nilai tertinggi selama periode penelitian. Memasuki tahun 2017 hingga 2022, kontribusi UMKM mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan pada tahun 2020–2022 diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas usaha dan perdagangan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 kontribusi UMKM kembali meningkat, namun pada tahun 2024 kembali mengalami sedikit penurunan. Secara keseluruhan, perkembangan kontribusi UMKM di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meskipun mengalami fluktuasi akibat berbagai kondisi ekonomi.

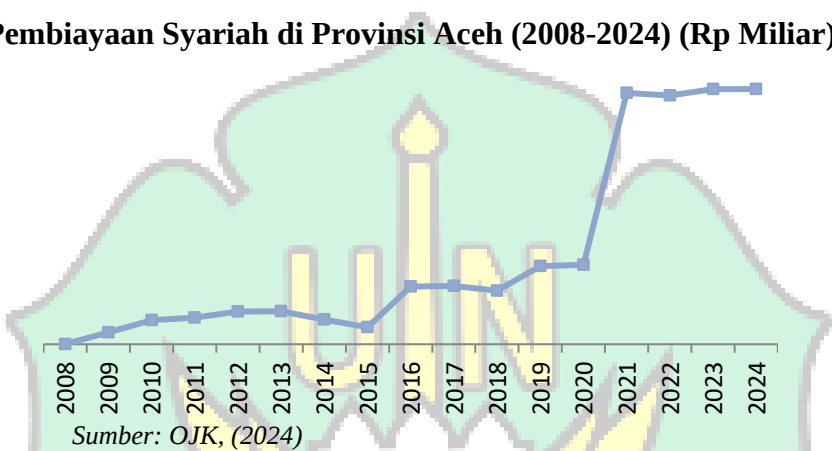
4.2.3. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Provinsi Aceh

Pembiayaan syariah menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendukung aktivitas perekonomian di Provinsi Aceh. Penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha, sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Meningkatnya pembiayaan syariah diharapkan mampu mendorong perkembangan usaha, memperluas kegiatan ekonomi, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Berdasarkan Tabel 4.1 yang mencakup 17 sampel observasi, variabel pembiayaan syariah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 302,9280, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 6.495,740. Nilai rata-rata (mean) pembiayaan syariah sebesar 2.477,567, dengan nilai median sebesar 1.463,519. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 2.402,276 menunjukkan bahwa variasi data pembiayaan syariah selama periode penelitian relatif tinggi. Hal ini tercermin dari nilai standar deviasi yang hampir mendekati nilai rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa penyebaran data pembiayaan

syariah cukup beragam antar tahun pengamatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pembiayaan syariah di Provinsi Aceh. Berikut disajikan grafik pembiayaan syariah di Provinsi Aceh:

Gambar 4.4

Pembiayaan Syariah di Provinsi Aceh (2008-2024) (Rp Miliar)



Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa pembiayaan syariah di Provinsi Aceh selama periode 2008–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008, pembiayaan syariah tercatat sebesar 3,776 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 302,928 miliar rupiah pada tahun 2009 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 836,308 miliar rupiah pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2014 dan 2015 pembiayaan syariah mengalami penurunan menjadi 626,176 miliar rupiah dan 432,957 miliar rupiah. Setelah itu, pembiayaan syariah kembali meningkat pada periode 2016–2020 hingga mencapai 2.021,113 miliar rupiah. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021, yaitu mencapai 6.398,309 miliar

rupiah. Kondisi tersebut sejalan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada penelitian (Zulfahmi, 2021) yang mendorong seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga turut meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2022 pembiayaan syariah sedikit menurun menjadi 6.332,073 miliar rupiah, kemudian kembali meningkat menjadi 6.495,740 miliar rupiah pada tahun 2023 yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian, sebelum kembali sedikit menurun menjadi 6.492,459 miliar rupiah pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah di Provinsi Aceh menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode, yang mencerminkan semakin berkembangnya peran perbankan syariah dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

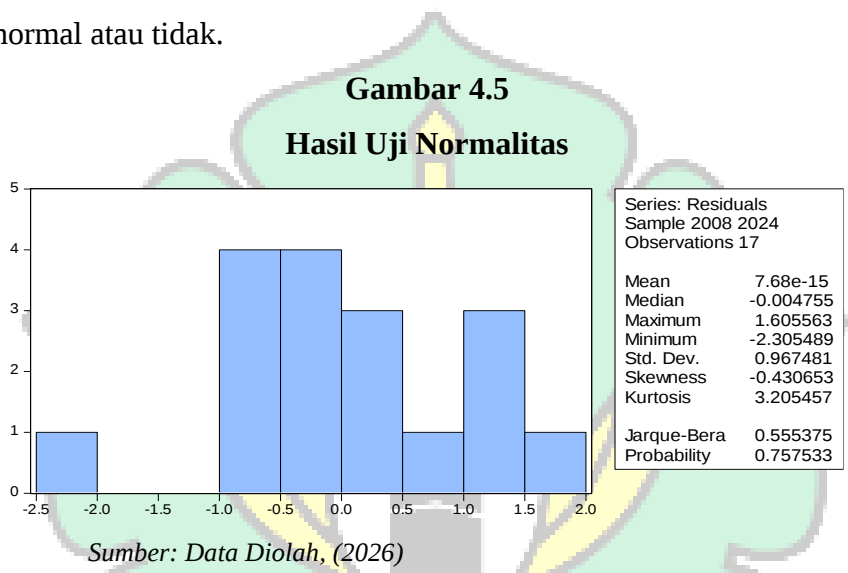
4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan dalam analisis regresi. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi klasik sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat digunakan secara tepat dalam pengambilan kesimpulan. Asumsi-asumsi yang diuji meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan dengan

menggunakan aplikasi EViews yang memudahkan proses pengujian dan evaluasi terhadap model regresi yang digunakan.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan *Jarque Bera* untuk menilai data residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak.



Berdasarkan Gambar 4.5 hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diamati bahwa nilai probabilitas sebesar 0.757 lebih besar daripada nilai signifikansi 0.05 atau 5%, dengan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.555. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal, dan langkah pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinesritas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncerented VIF	Centered VIF
C	25.31976	402.3758	NA
X1	0.096298	335.5684	1.001583
LOGX2	0.345365	56.93519	1.001583

Sumber: Data Diolah, (2026)

Berdasarkan tabel 4.2, nilai VIF untuk variable UMKM (X1) dan Pembiayaan Syariah (X2) masing-masing sebesar 1.001. Nilai tersebut lebih kecil dari 10 sesuai dengan kriteria bahwa nilai VIF tidak melebihi 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antarvariabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi, sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai kestabilan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik ditunjukkan oleh varians residual yang bersifat konstan pada setiap pengamatan. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *White Test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.950018	Prob. F(5,11)	0.0627
Obs*R-squared	9.737890	Prob. Chi-Square(5)	0.0830
Scaled explained SS	7.282687	Prob. Chi-Square(5)	0.2005

Sumber: Data Diolah, (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas *White Test*, diperoleh nilai *Prob.Chi-Square* sebesar 0,083. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 5% ($0.083 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas) dan model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara residual. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini akan menerapkan *Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Berikut hasil uji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
F-statistic	0.336610	Prob. F(2,12)	0.7207
Obs*R-squared	0.903065	Prob. Chi-Square(2)	0.6367

Sumber: Data Diolah, (2026)

Dari Tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa nilai *Prob Chi-Square* untuk penelitian ini adalah 0.636, yang merupakan nilai yang lebih besar dari signifikan $\alpha = 5\%$ (0.05). dengan menggunakan pengujian *Breusch-Godfrey Serial LM Test* untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penggunaan regresi linear berganda bertujuan untuk melihat arah hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam suatu penelitian. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	48.73842	9.685938	0.0000
X1	0.795190	2.562494	0.0226
LOGX2	0.904881	1.539756	0.1459
	R-squared	0.381549	
	Prob(F statistic)	0.034605	

Sumber: Data Diolah, (2026)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.6, diperoleh persamaan regresi yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = 48.738 + 0.795\text{Kontribusi UMKM} + 0.904\text{Pembiayaan Syariah} + e$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta diperoleh sebesar 48.738 menunjukkan bahwa apabila variabel Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah dianggap konstan, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan sebesar 48.738 %.
- b. Koefisien regresi pada variabel Kontribusi UMKM sebesar 0.795 menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan terhadap TPAK. Artinya, setiap peningkatan UMKM sebesar 1 persen akan meningkatkan TPAK sebesar 0.795%, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
- c. Pada variabel LOG Pembiayaan Syariah nilai probabilitas sebesar 0.145 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.904 yang menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap TPAK. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun koefisiennya positif, pengaruh pembiayaan syariah terhadap TPAK belum cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.5:

1. Variabel Kontribusi UMKM (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.795 dengan nilai probabilitas sebesar 0.022 yang mana lebih kecil dari 0.05 maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Aceh.
2. Variabel Pembiayaan Syariah (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.904 dengan nilai probabilitas sebesar 0.145 yang mana lebih besar dari 0.05 sehingga H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Aceh.

4.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil regresi pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Prob(F-Statistic) memiliki nilai sebesar 0.034 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.5 nilai R-squared sebesar 0.3815 atau 38,15%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah mampu menjelaskan variasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Aceh sebesar 38,15%, sedangkan sisanya sebesar 61,85% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh dari pengujian regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen didapatkan hasil sebagai berikut:

4.6.1. Pengaruh Kontribusi UMKM Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kontribusi UMKM memiliki koefisien sebesar 0.795 dengan nilai probabilitas sebesar 0.022 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (5%) menunjukkan bahwa secara parsial kontribusi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kontribusi UMKM sebesar 1 persen akan diikuti oleh peningkatan TPAK sebesar 0.79 persen, dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap tetap (*ceteris paribus*). Temuan ini konsisten dengan Teori Klasik Adam Smith yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembagian kerja dan spesialisasi akan meningkatkan produktivitas serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Semakin berkembang suatu kegiatan usaha, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat sehingga mendorong masyarakat usia kerja untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya kontribusi UMKM menunjukkan bahwa sektor UMKM semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Perkembangan tersebut mendorong terciptanya lapangan kerja baru karena UMKM merupakan sektor yang mampu

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, UMKM memiliki karakteristik padat karya sehingga keberadaannya dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin besarnya kontribusi UMKM, semakin banyak penduduk usia kerja yang terdorong untuk bekerja maupun mencari pekerjaan sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat. Oleh karena itu, kontribusi UMKM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar kerja.

Penelitian ini sejalan dengan Lestari & Santoso Bambang (2024) *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu*. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa jumlah unit usaha UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Seluma. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin berkembangnya UMKM, semakin besar pula kemampuan sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Nasution *et al* (2021) *Jumlah UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia*. Penelitian Rasha *et al* (2025) juga memperoleh hasil yang sama dengan judul Analisis Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.

4.6.2. Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan kepada pelaku UMKM belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar pembiayaan cenderung digunakan sebagai tambahan modal usaha, seperti pembelian bahan baku, pengadaan atau pembaruan peralatan produksi, serta perluasan kapasitas usaha. Penggunaan pembiayaan tersebut memang dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi, namun belum tentu diikuti dengan penambahan tenaga kerja baru. Akibatnya, peningkatan pembiayaan syariah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh. Seperti sama halnya dalam penelitian Aliyah & Auwalin (2020) menduga hal ini terjadi karena penerapan capital insentive oleh pemilik usaha. Untuk meningkatkan output, produsen harus mengorbankan salah satu diantara faktor produksi, yaitu Sumber Daya Alam, tenaga kerja dan modal. Jika hal tersebut tidak dilakukan produksi tersebut dapat dikatakan tidak efisien karena terdapat batasan anggaran yang menyebabkan biaya produksi melebihi proyeksi penerimaan dari penjualan. berdasarkan penelitian dari lannelongue dkk (2016) bahwa semakin tinggi

produktivitas tenaga kerja, produsen enggan untuk menambah tenaga kerja baru. Meskipun demikian, secara teoritis pembiayaan syariah tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan sektor riil yang mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ulum *et al* (2026) *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera* yang menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan syariah memiliki potensi untuk mendorong kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, pengaruhnya belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh dibandingkan pembiayaan syariah. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Aliyah & Auwalin (2020) *Pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMKM baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang*. Penelitian Nurreza & Cahyono (2024) juga memperoleh hasil yang sama dengan judul *Peran Bank Syariah Dalam Menggerakkan Mobilitas Sosial (Studi Kasus: Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Umkm*

Melalui Pembiayaan Umkm Di Indonesia). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Khairina et al., (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mampu mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

4.6.3. Pengaruh Secara Simultan Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh

Pengujian secara simultan melalui uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, nilai F-statistic sebesar 4.318 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.034. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa variabel kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah secara bersama-sama memiliki peran dalam memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan ekonomi. Keberadaan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta dukungan pembiayaan syariah yang dapat meningkatkan aktivitas usaha memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Dengan meningkatnya partisipasi penduduk dalam angkatan kerja, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi meningkatnya peluang penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara kontribusi UMKM dan pembiayaan syariah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan TPAK selama periode penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi UMKM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh
2. Pembiayaan Syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh
3. Kontribusi UMKM dan Pembiayaan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan tetap memperkuat kebijakan pengembangan UMKM melalui peningkatan fasilitas usaha, kemudahan perizinan, serta program pemberdayaan seperti pelatihan dan pendampingan usaha. Hal ini penting agar UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi

lebih optimal dalam penyerapan tenaga kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga dapat mendorong pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, diharapkan dapat memanfaatkan berbagai program pembinaan dan fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah maupun lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dengan pengelolaan usaha yang lebih baik, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja, seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, atau teknologi. Selain itu, penelitian selanjutnya perpanjang durasi penelitian juga diharapkan dan menggunakan metode analisis yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Ahmadiono. (2021). *Ahmadiono* (Mahmudah, Ed.). Iain Jember Press. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13328/1/BukuAhmadiono.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/13328/1/BukuAhmadiono.Pdf)
- Aliyah, M., & Auwalin, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia: Metode Autoregressive Distributed Lag (Ardl). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2313. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202012pp2313-2325>
- Dermawan, R. F. N., Syarief, M. E., & Kristianingsih, K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Jawa Barat. *Indonesian Journal Of Economics And Management*, 2(2), 368–378. <https://doi.org/10.35313/Ijem.V2i2.3696>
- Gatiningsih. (2022). *Perencanaan Tenaga Kerja Berbasis Revolusi Industri 4.0*.
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multiverse Dengan Program Spss 25. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1). http://sciteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Gunawan, B., Fazri. Ar, M. R., & Usyfiani, A. (2025). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Menyerap Tenaga Kerja (Studi Pada Usaha Laundry Di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah)*. 2(April), 1–11.

- Hafni Roswita, & Ahmad, R. (2020). Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15, 77–96.
- Hasanah, U. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2016-2020. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 91–100. <https://doi.org/10.58561/Margin.V1i2.41>
- Hertomo, Antonius I. (2020). Manufaktur Menengah Dan Besar Di Indonesia Tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(3), 72–84.
- Heryanti, A. H., & Pasca, A. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Telagasari (Studi Pada Industri Rumah Tangga). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 14–22.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Jenkins, D. G., & Quintana-Ascencio, P. F. (2020). A Solution To Minimum Sample Size For Regressions. *Plos One*, 15(2), 1–15. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0229345>
- Julia, P. N., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Umkm: Kajian Akuntansi Syariah. *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 9021–9029. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Juliana. (2024). *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh* (M. Ridha, Ed.). Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Kesumawati, F. O., & Fisabilillah, L. W. P. (2024). Analisis Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal Of Economics*, 4(2), 44–51. <https://doi.org/10.26740/Independent.V4i2.62970>

- Khairina, N. N., Syarief, M. E., & Setiawan. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Riil. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/Hf.V7i1.6812>
- Lestari, S., & Sutanty, M. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(3), 458–469. <https://doi.org/10.58406/Jeb.V11i3.1390>
- Lestari, & Santoso Bambang. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. *Jurbisman*, 2(Vol. 2, No. 2, Juni 2024), 357–368. <https://doi.org/10.47685/Cendekia-Jaya.V1i1.8>
- Muttaqim Hakim. (2025). *Koperasi Dan Umkm Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia* (Vol. 2).
- Nasution, D. P., Faried, A. I., & Agustino, A. (2021). Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Umkm Di Indonesia. *Digital Repository Universitas Jember*, 6.
- Nasution, N. A., & Rizkina, M. (2022). Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29040/Jie.V6i2.6078>
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 321–336. <https://doi.org/10.22373/Tadabbur.V1i2.24>
- Nurjannah, F., & Muslihat, A. (2024). Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Penyerapan Kontribusi Tenaga Kerja Di Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 10, 314–320.

- Nurreza, A. I. N., & Cahyono, E. F. (2024). Peran Bank Syariah Dalam Menggerakkan Mobilitas Sosial (Studi Kasus: Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Umkm Melalui Pembiayaan Umkm Di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1, 125–141.
- Pangestu, D., Badli, S., & Risma Okta Rabiana. (2025). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 78–95.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 170–177.
- Randahl, D. (2025). This Is Not Normal! (Re-) Evaluating The Lower N Guidelines For Regression Analysis. *Teaching Statistics*, 48(2), 130–137. <https://doi.org/10.1111/Test.70012>
- Rasha, P. T. A., Shandyka, M. W., & Handayani, S. (2025). Analisis Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. 9, 165–171.
- Saputra Erick Permana. (2016). Pengaruh Pertambahan Penduduk Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Bontang. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 961–970.
- Sasra, L. A. (2023). Urgensi Mendorong Kapasitas Umkm Aceh. 1–6.
- Sembiring, N. O. (2015). Analisis Permintaan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2000-2010 (Vol. 2010). Universitas Diponegoro.
- Silalahi, R., Masinambow, V. A. ., & Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8), 49–60.

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suhada, Irwansyah, & Marlina, L. (2025). *Pengaruh Pembiayaan Syariah, Inovasi Sosial, Dan Inklusi Sosial, Terhadap Pertumbuhan Umkm*. 4(1), 277–289.
- Tri Irawan, F., & Mulyany, R. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 314–327.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15832>
- Ulum, M. B., Nugraha, P., & Tanzil, D. (2026). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)*, 5.
- Utami, F. A. P., Fathoni, M. A., & Hasbi, S. (2019). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Perbankan Syariah Di Indonesia*. 158–177.
- Utami Try Wahyu, Susanto, P. C., Sawitri, N. N., Lesmini, L., Setyowati, T. M., Belani, S., Perwitasari, E. P., Marlita, D., Mulyanto, Setyawati, A., Roza, N., Tahir, A. M. S., Indryati, Hasibuan, L., Jumawan, & Widyastuti, T. (2023). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Konsep Dan Teori*.
- Zakiyah, Abdul, W., & Ilma, M. (2025). *Pembiayaan Syariah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(01), 50–63.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Kontribusi UMKM, Pembiayaan Syariah Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh

Tahun	Kontribusi UMKM (Persen)	Log Pembiayaan Syariah	Penyerapan Tenaga Kerja
2008	13.39	3.58	60.32
2009	14.27	2.48	62.5
2010	13.65	2.79	63.17
2011	14.06	2.83	63.78
2012	14.31	2.92	61.77
2013	14.43	2.92	62.07
2014	14.83	2.80	63.06
2015	15.75	2.64	63.44
2016	16.08	3.17	64.26
2017	16.01	3.17	63.74
2018	15.82	3.13	64.04
2019	15.51	3.30	63.13
2020	14.79	3.31	65.1
2021	14.3	3.81	63.78
2022	14	3.80	63.5
2023	15.17	3.81	64.77
2024	14.99	3.81	65.11

Lampiran 2: Output Hasil Uji Regresi Linear Berganda

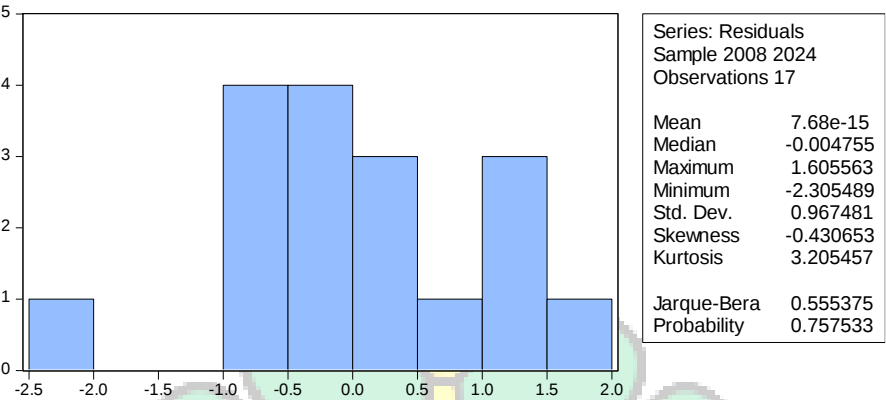
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/15/26 Time: 15:39
Sample: 2008 2024
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.73842	5.031874	9.685938	0.0000
X1	0.795190	0.310319	2.562494	0.0226
X2	0.904881	0.587678	1.539756	0.1459
R-squared	0.381549	Mean dependent var		63.38471
Adjusted R-squared	0.293199	S.D. dependent var		1.230239
S.E. of regression	1.034280	Akaike info criterion		3.064074
Sum squared resid	14.97631	Schwarz criterion		3.211112
Log likelihood	-23.04463	Hannan-Quinn criter.		3.078690
F-statistic	4.318597	Durbin-Watson stat		1.516355
Prob(F-statistic)	0.034605			

Lampiran 3: Output Hasil Uji Deskriptif

Mean	14.78588	2477.567	63.38471
Median	14.79000	1463.519	63.50000
Maximum	16.08000	6495.740	65.11000
Minimum	13.39000	302.9280	60.32000
Std. Dev.	0.833899	2402.276	1.230239
Skewness	0.110044	0.925876	-0.763193
Kurtosis	1.877319	2.139187	3.498220
Jarque-Bera	0.927103	2.953741	1.826139
Probability	0.629046	0.228351	0.401291
Sum	251.3600	42118.64	1077.540
Sum Sq. Dev.	11.12621	92334883	24.21582
Observations	17	17	17

Lampiran 4: Output Hasil Uji Normalitas



Lampiran 5: Output Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/15/26 Time: 15:42
Sample: 2008 2024
Included observations: 17

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	25.31976	402.3758	NA
X1	0.096298	335.5684	1.001583
X2	0.345365	56.93519	1.001583

Lampiran 6: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.950018	Prob. F(5,11)	0.0627
Obs*R-squared	9.737890	Prob. Chi-Square(5)	0.0830
Scaled explained SS	7.282687	Prob. Chi-Square(5)	0.2005

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/15/26 Time: 15:41
Sample: 2008 2024
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.05726	139.4786	0.430584	0.6751
X1^2	0.473776	0.487531	0.971786	0.3520
X1*X2	-0.522909	1.037702	-0.503911	0.6243
X1	-13.43030	15.96719	-0.841118	0.4182
X2^2	-3.339007	1.826324	-1.828266	0.0947
X2	29.70440	20.40441	1.455784	0.1734
R-squared	0.572817	Mean dependent var		0.880959
Adjusted R-squared	0.378643	S.D. dependent var		1.348558
S.E. of regression	1.063017	Akaike info criterion		3.230663
Sum squared resid	12.43005	Schwarz criterion		3.524738
Log likelihood	-21.46064	Hannan-Quinn criter.		3.259895
F-statistic	2.950018	Durbin-Watson stat		1.648698
Prob(F-statistic)	0.062658			

Lampiran 7: Output Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.336610	Prob. F(2,12)	0.7207
Obs*R-squared	0.903065	Prob. Chi-Square(2)	0.6367

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/15/26 Time: 15:42

Sample: 2008 2024

Included observations: 17

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.218350	5.301862	-0.041184	0.9678
X1	-0.014956	0.331432	-0.045124	0.9648
X2	0.130639	0.719909	0.181466	0.8590
RESID(-1)	0.000841	0.333206	0.002524	0.9980
RESID(-2)	-0.250639	0.309266	-0.810432	0.4335
R-squared	0.053121	Mean dependent var	7.68E-15	
Adjusted R-squared	-0.262505	S.D. dependent var	0.967481	
S.E. of regression	1.087073	Akaike info criterion	3.244784	
Sum squared resid	14.18074	Schwarz criterion	3.489847	
Log likelihood	-22.58066	Hannan-Quinn criter.	3.269144	
F-statistic	0.168305	Durbin-Watson stat	1.695739	
Prob(F-statistic)	0.950432			